

Mewujudkan Petani Kecil Sawit Mandiri yang Lebih Produktif dan Berkelanjutan di Indonesia

Pandangan dari pengembangan tipologi petani kecil

Idsert Jelsma
George Christoffel Schoneveld



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Working Paper 217

Mewujudkan Petani Kecil Sawit Mandiri yang Lebih Produktif dan Berkelanjutan di Indonesia

Pandangan dari pengembangan tipologi petani kecil

Idsert Jelsma
Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
Universitas Utrecht

George Christoffel Schoneveld
CIFOR

Working Paper 217

© 2016 Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)



Materi dalam publikasi ini berlisensi di dalam Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DOI: 10.17528/cifor/006334

Idsert J dan Schoneveld GC. 2016. *Mewujudkan Petani Kecil Sawit Mandiri yang Lebih Produktif dan Berkelanjutan di Indonesia: Pandangan dari pengembangan tipologi petani kecil*. Working Paper 217. Bogor, Indonesia: CIFOR.

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede
Bogor Barat 16115
Indonesia

T +62 (251) 8622-622
F +62 (251) 8622-100
E cifor@cgiar.org

cifor.org

Kami ingin berterima kasih kepada para donatur yang telah mendukung penelitian ini melalui kontribusinya terhadap Dana CGIAR. Untuk daftar donor dapat dilihat dalam: <https://www.cgiarfund.org/FundDonors>

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini berasal dari penulis dan bukan merupakan pandangan CIFOR, para penyunting, lembaga asal penulis atau penyanggah dana maupun para peninjau buku.

Daftar isi

Ucapan terima kasih	v
1 Pendahuluan	1
2 Kemunculan petani kecil sawit mandiri di Indonesia	2
3 Konteks studi	4
4 Metode	7
5 Hasil	9
6 Tipologi petani kecil	11
6.1 Tipe 1: Petani kecil migran	11
6.2 Tipe 2: Petani kecil asli	12
6.3 Tipe 3: Petani migran kelas-menengah	13
6.4 Tipe 4: Petani asli menengah	14
6.5 Tipe 5: Petani skala besar perintis bukaan lahan baru	15
6.6 Tipe 6: Produsen besar terkonsolidasi	16
7 Kesimpulan dan saran	18
Referensi	20

Daftar gambar dan tabel

Gambar

1 Perbandingan wilayah tanam sawit, berdasarkan jenis aktor 1978–2016.	2
2 Lokasi Kabupaten Rokan Hulu dan pabrik di wilayah Rokan Hulu.	5
3 Deforestasi di Rokan Hulu.	6
4 Kedalaman gambut di Rokan Hulu.	6
5 Sebaran sawit di areal sampel.	7

Tabel

1 Kapasitas pengolahan sawit di Riau.	4
2 Ringkasan hasil analisis penginderaan jarak jauh.	8
3 Hasil HCA.	9
4 Petikan hasil survei mendalam sub-sampel.	10

Ucapan terima kasih

Pekerjaan lapangan, analisis dan penulisan laporan ini didukung oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) yang merupakan bagian dari proyek penelitian berjudul “Investasi Skala-Besar untuk Pangan, Serat dan Energi (LIFFE)”. Proyek ini didanai oleh Program KNOWFOR Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya (DFID). Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan, serta pejabat pemerintah dan pengurus desa (Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW), para petani, manajer perkebunan, pekerja perkebunan dan warga desa yang telah memberi masukan berharga mengenai bentang alam sawit Rokan Hulu. Ucapan terima kasih khususnya disampaikan pada mereka yang telah menerima kami di rumahnya. Kami juga sangat menghargai bantuan dari staf dan konsultan lain di CIFOR yang memfasilitasi penyusunan peta dan sampling kerangka kerja.

1 Pendahuluan

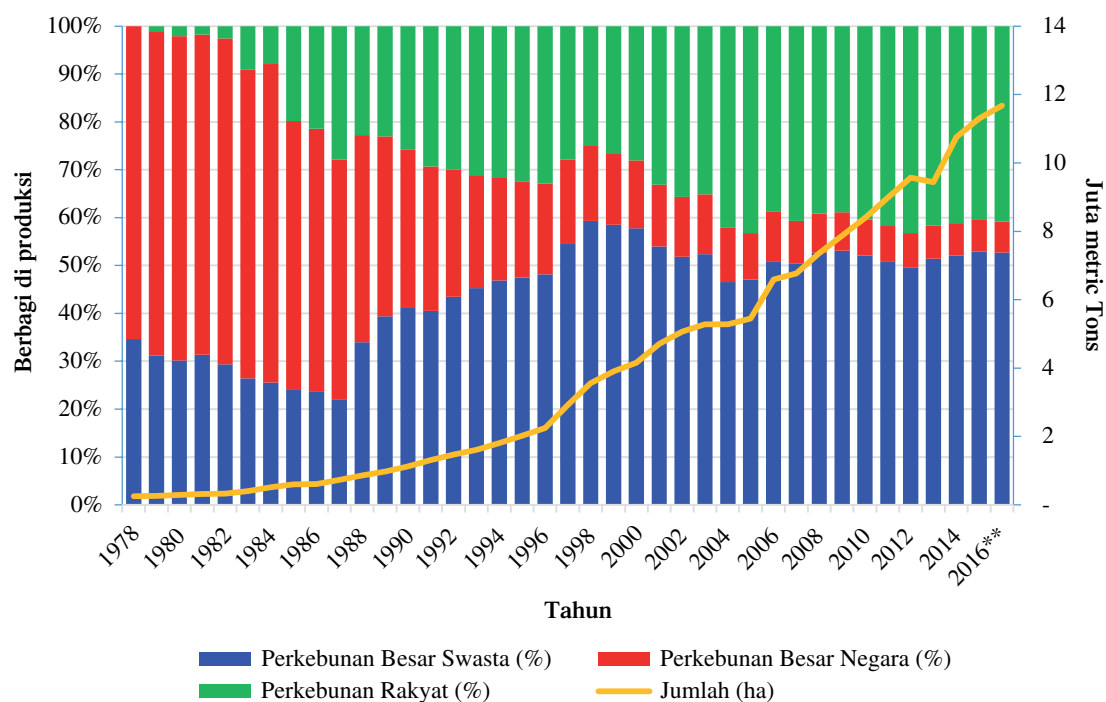
Sejalan dengan makin dominannya peran petani kecil sebagai kelompok produsen sawit di Indonesia, upaya meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas praktik produksi mereka mulai menjadi bagian penting dalam wacana kebijakan di Indonesia. Mengingat sebagian besar petani kecil beroperasi secara mandiri – seringkali tanpa dukungan teknis dan masukan dari produsen korporasi dan berada di luar lingkup negara – banyak aktivitas petani tersebut kurang tersentuh regulasi dan dukungan. Hasilnya, petani kecil mandiri di Indonesia tidak hanya menjadi produsen sawit dengan tingkat produktivitas rendah, tetapi juga seringkali beroperasi tanpa kelayakan perizinan dan pada lahan yang secara legal, tidak boleh dibudidayakan. Meningkatkan produktivitas para petani kecil mandiri, khususnya peningkatan yang dianggap sebagai cara penting untuk meningkatkan sektor produktivitas dan penghasiian petani kecil, dengan dikombinasikan upaya-upaya lainnya, dapat secara signifikan menurunkan tekanan ekologis terhadap gambut dan bentang alam hutan. Terlebih lagi, masalah legalitas petani kecil menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan agar memenuhi standar Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)¹. Upaya ini akan mampu mengurangi risiko tersingkirnya petani dari pasar formal, yang semakin menuntut kepatuhan penyuplai pada standar publik seperti ISPO, selain standar keberlanjutan lain seperti Perundingan Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO) dan komitmen nol-deforestasi.

Dalam mengembangkan intervensi yang sesuai, pemerintah Indonesia dan berbagai program bantuan teknis petani mulai mengakui bahwa karena petani kecil sawit mandiri merupakan populasi yang sangat heterogen, sehingga diperlukan pendekatan lebih terencana dalam menangani masalah produktivitas, keberlanjutan dan legalitas. Namun, ketiadaan pengetahuan komprehensif dasar mengenai karakteristik petani kecil dan tantangan spesifiknya melemahkan upaya formulasi dan skala pendekatan yang tepat. Untuk memperkuat upaya ini, Makalah Kerja ini menyajikan hasil awal dari survei petani dan pertanian di provinsi Riau, Sumatera. Dengan menggunakan analisis kluster hirarkis (HCA) dihasilkan tipologi petani yang membagi petani sawit menjadi enam sub-kelompok homogen. Dari analisis tersebut juga teridentifikasi sejumlah tantangan kebijakan dan prioritas berbeda tiap sub-kelompok, dan ditemukan perbedaan mendasar antara petani kecil di areal bukaan baru (frontier) dengan petani di areal perkebunan yang lebih mapan. Hasil penelitian ini memberikan masukan pada upaya untuk menyusun bentuk-bentuk intervensi yang lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi setiap kelompok di lokasi berbeda.

¹ Dalam Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/3/2015 pada 2015, petani mandiri secara sukarela perlu mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria ISPO khusus petani (Lampiran VI). Peraturan ini mencakup persyaratan legalitas (mis. bukti kepemilikan lahan, tidak berlokasi di klasifikasi lahan negara atau lahan hutan), penyiapan lahan (mis. tidak melakukan pembakaran, membuat teras pada lahan miring, membuat kanal di lahan gambut), penanaman (mis. menggunakan benih tanaman resmi bersertifikat), dan tata kelola perkebunan (mis. terkait tata kelola penjadwalan air, pengendalian hama dan penggunaan pupuk).

2 Kemunculan petani kecil sawit mandiri di Indonesia

Budidaya sawit oleh petani kecil pertama kali dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1980-an, untuk mengembangkan dan secara politis mengintegrasikan pulau-pulau luar Indonesia. Pada awalnya, inisiatif ini diupayakan untuk mengaitkan petani kecil dengan perusahaan perkebunan milik negara lewat sistem yang dikenal dengan skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Sepanjang tahun 1990-an, perluasan variasi skema ini meningkat, dipicu oleh munculnya perusahaan-perusahaan swasta. Pada tahun 2010, petani PIR di Indonesia sudah mengelola lahan sawit seluas 700.000 hingga 900.000 ha (Badrun, 2011, Zen, Barlow, *et al.* 2016). Dengan meningkatnya kesejahteraan sebagian besar petani PIR, seiring berkembangnya pasar sawit dan infrastrukturnya, menjadikan budidaya sawit mandiri makin menarik bagi para petani kecil di provinsi lain. Pada 2016, wilayah yang dibudidayakan oleh petani kecil sawit diperkirakan mencapai 4,7 juta ha (atau 41%) dari keseluruhan lahan sawit di Indonesia (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015) (Gambar 1). Dari jumlah itu, sebagian besar lahan dikuasai oleh petani kecil mandiri. Tanpa adanya dukungan dan pengaturan yang cukup dari pemerintah terhadap perluasan perkebunan rakyat tersebut, sebagian besar petani kecil bergantung pada bahan baku (*input*) informal dan pasar temporer (*offtake*). Sistem produksi petani juga ditandai dengan hasil panen rendah dan praktik pertanian yang buruk.



Gambar 1. Perbandingan wilayah tanam sawit, berdasarkan jenis aktor 1978–2016.

** Data 2016 adalah data estimasi

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2015)

Rata-rata hasil produksi perusahaan 25% lebih besar dari hasil panen petani (dihitung dari Direktorat Jenderal Perkebunan 2015). Petani yang memiliki ikatan dengan perusahaan, misalnya melalui skema PIR dan mendapatkan masukan teknis dan input, cenderung lebih produktif daripada petani kecil mandiri. Perbedaan hasil panen diperkirakan sekitar 10-15% (Molenaar, Persch-Orth, *et al.* 2013)

hingga 11-48% (Zen, Barlow, *et al.* 2016). Perbedaan tersebut disebabkan rendahnya penggunaan pupuk dan kurangnya akses yang dimiliki petani terhadap sumber pupuk dan pestisida, penggunaan benih berkualitas rendah dan penerapan praktik produksi yang buruk (Donough, Witt, *et al.* 2010, Zen, Barlow, *et al.* 2016). Molenaar, *et al.* (2013) juga mencatat bahwa dibandingkan petani PIR, petani mandiri kurang mengadopsi praktik produksi berkelanjutan, yang pada gilirannya berdampak menurunkan produktivitasnya. Produktivitas rendah juga cenderung mendorong petani untuk memperluas areal kebun mereka untuk meningkatkan produksi mereka, yang berdampak buruk secara ekologis terhadap bentang alam. Hubungan ini menegaskan kaitan erat antara keberlanjutan dan produktivitas.

3 Konteks studi

Di Indonesia, Riau merupakan provinsi dengan wilayah budidaya sawit terbesar, diperkirakan meliputi 23% dari total luas area sawit siap panen dan diperkirakan terdiri dari 30% petani kecil sawit Indonesia. Dari 3,46 juta ha lahan sawit di Riau, 58,6% diklasifikasikan di bawah budidaya petani kecil sawit, dan sebanyak 3,6% dan 37,8% masing-masing dibudidayakan oleh perusahaan milik negara dan swasta (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015). Pabrik tanpa perkebunan, yang disebut sebagai pabrik mandiri, mencakup 33% dari total kapasitas pengolahan minyak sawit di Riau (Tabel 1). Pabrik-pabrik tersebut umumnya mengambil buah sawit dari petani kecil mandiri. Ini menjadi pertanda tingkat kematangan perkebunan sawit petani mandiri di Riau.

Seperti terlihat dari Tabel 1, kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi lokasi penelitian ini, memiliki kapasitas pengolahan dan jumlah pabrik terbesar di Riau. Pabrik mandiri terhitung lebih dari sepertiga kapasitas pengolahan di Rokan Hulu. Separuh dari 8513.7 km² luas wilayah Rokan Hulu menjadi lahan budidaya sawit. Pada 2014, petani yang melakukan kegiatan secara mandiri mencapai hampir 56% dari total area (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015).

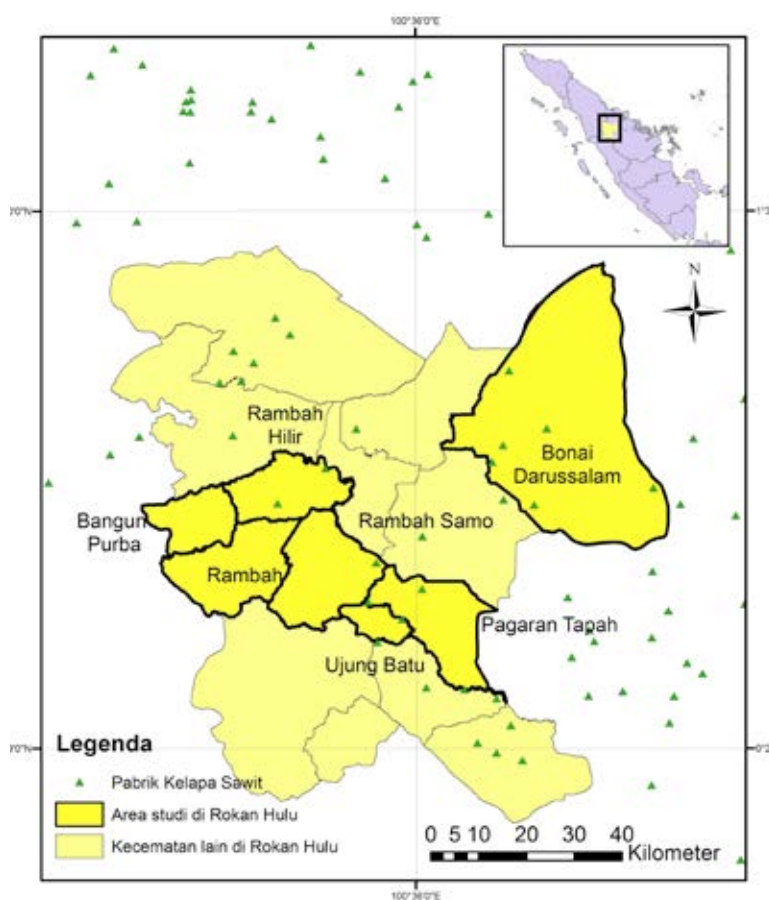
Dalam penelitian ini, tujuh kecamatan di Rokan Hulu, dipilih dalam aktivitas penelitian yang terbagi ke dalam dua wilayah dengan ukuran yang sama, tetapi memiliki perbedaan ekologis dan demografis. Salah satu kecamatan, Bonai Darussalam berada di timur laut, sebagian wilayahnya berupa tanah gambut. Daerah ini mengalami deforestasi dengan kecepatan tinggi dalam tahun-tahun terakhir ini, dan relatif lebih jarang penduduk. Kepadatan penduduknya hanya 29,5 orang/km² (lihat Gambar 2, 3 dan 4). Wilayah penelitian lain adalah Rokan Hulu Tengah, yang memiliki enam kecamatan. Sebagian besar lahan mengandung tanah mineral. Deforestasi di wilayah tersebut terjadi sebelum 1990-an. Dibanding Bonai Darussalam, Rokan Hulu Tengah lebih padat, dengan kepadatan penduduk 151 orang/km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu 2015).

Perluasan kebun sawit di Rokan Hulu akhir-akhir ini terutama terjadi di Bonai Darussalam, yang seringkali masuk ke dalam kawasan hutan. Di lahan ini kebakaran gambut terkait ekspansi sawit menjadi lumrah. Secara legal, kebun sawit petani hanya dapat dibangun di atas areal yang masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Memahami implikasi negatif terhadap lingkungan akibat dari tak teraturnya perluasan kebun sawit yang dilakukan petani kecil mandiri, mengungkap dinamika yang terjadi di lokasi tersebut, memberi informasi berharga tentang apa yang terjadi dengan kebun sawit rakyat di daerah bukaan baru (Bonai Darussalam), khususnya ketika dibandingkan dengan perkembangan kebun sawit di wilayah yang lebih mapan (Rokan Hulu Tengah).

Tabel 1. Kapasitas pengolahan sawit di Riau.

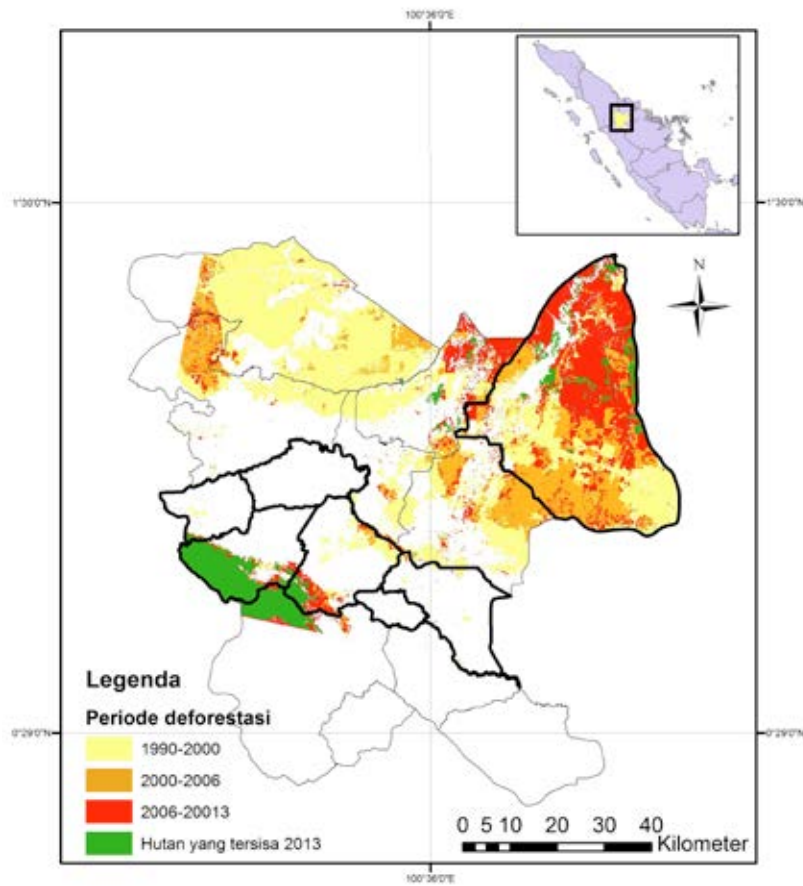
Kabupaten	Pabrik dengan kebun	Kapasitas (MT/jam)	Pabrik tanpa kebun	Kapasitas (MT/jam)	Total pabrik	Total kapasitas (MT/jam)	% kapasitas pabrik tanpa kebun
Rokan Hulu	22	1065	17	540	39	1605	34%
Kampar	26	1260	9	290	35	1550	19%
Rokan Hilir	14	645	14	545	28	1190	46%
Siak	13	615	12	490	25	1105	44%
Indragiri Hulu	14	570	10	435	24	1005	43%
Pelalawan	14	700	9	370	23	1070	35%
Kuantan Singingi	14	570	4	150	18	720	21%
Indragiri Hilir	14	650	4	180	18	830	22%
Bengkalis	8	365	6	190	14	555	34%
Dumai	2	120	0	0	2	120	0%
Pekanbaru	1	30	0	0	1	30	0%
Total Riau	142	6590	85	3190	227	9780	33%

Sumber: Dinas Perkebunan Riau (2015)

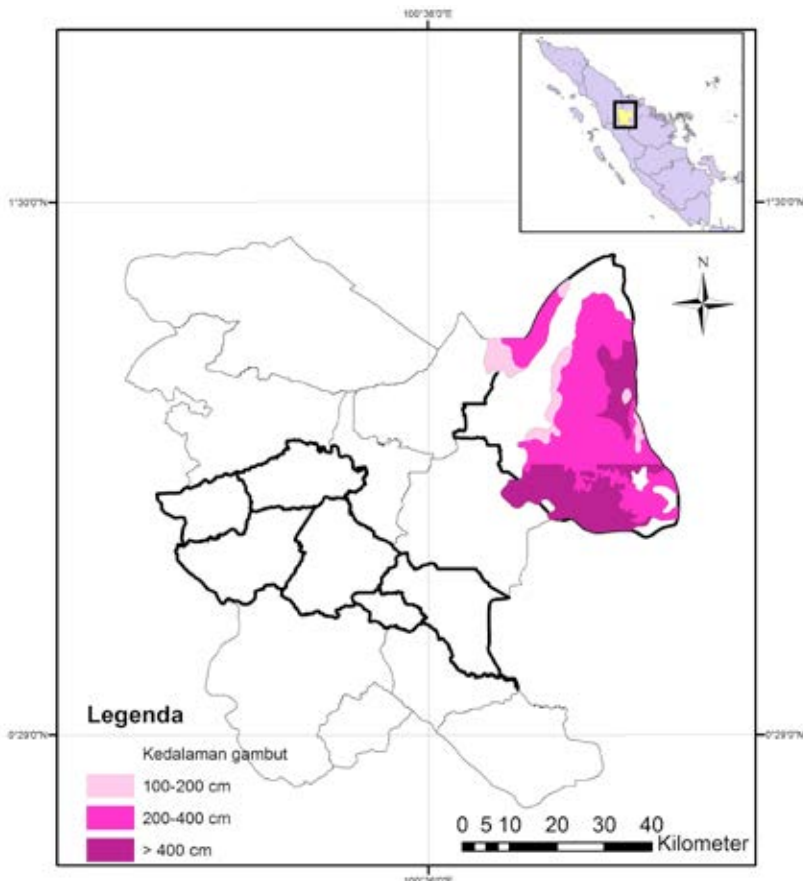


Gambar 2. Lokasi Kabupaten Rokan Hulu dan pabrik di wilayah Rokan Hulu.

Sumber: CIFOR (2014); BAPPEDA Rokan Hulu (tidak bertahun)



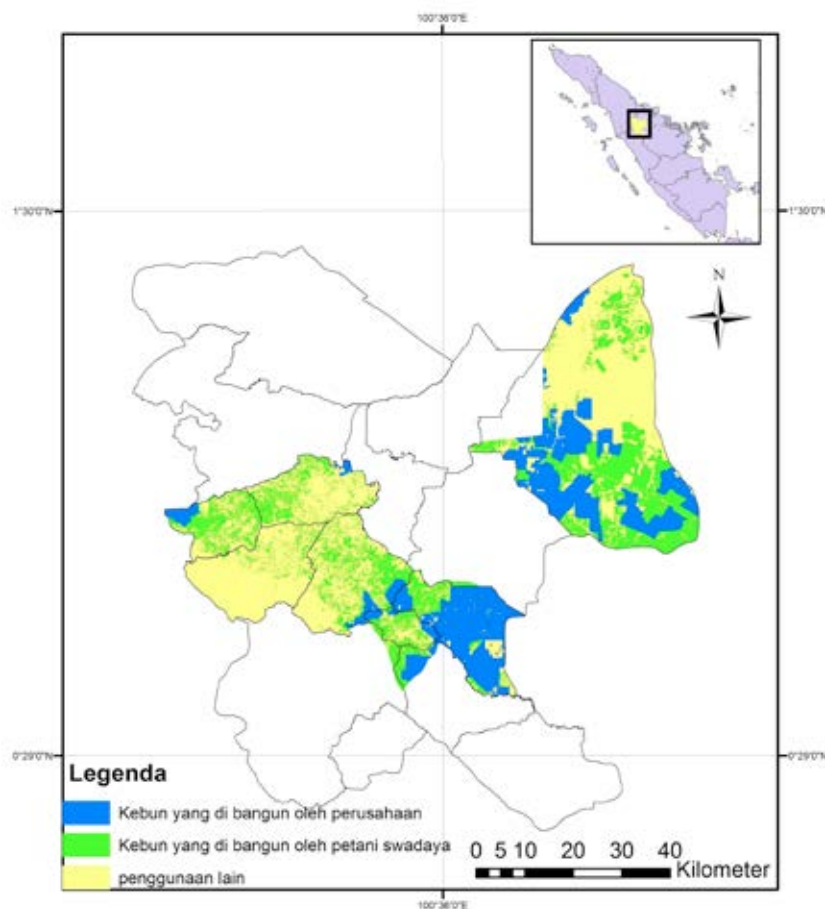
Gambar 3. Deforestasi di Rokan Hulu.
Sumber: ilustrasi penulis, berdasarkan CIFOR 2014



Gambar 4. Kedalaman gambut di Rokan Hulu.
Sumber: Ilustrasi penulis, berdasarkan Kementerian Pertanian dan BAPPEDA Rokan Hulu (tidak bertahun)

4 Metode

Mengingat tidak adanya daftar resmi petani kecil untuk pengambilan sampel acak, penelitian ini menggunakan sampel petani kecil secara spasial melalui interpretasi visual citra satelit resolusi tinggi terbaru yang tersedia melalui Google Earth. Di dalam wilayah penelitian, total 152.099 ha sawit dipetakan dan diklasifikasikan sebagai milik perusahaan atau milik petani sawit (Gambar 5; Tabel 2). Wilayah yang tidak bisa diklasifikasikan didatangi untuk validasi.



Gambar 5. Sebaran sawit di areal sampel.

Sumber: Iustrasi dan penelitian penulis.

Area yang teridentifikasi sebagai tanaman sawit petani kecil mandiri dipilih secara acak dengan menempatkan sel berukuran 500 m x 500 m (25 ha). Diperoleh total 287 sel atau mencakup 5,2% dari total wilayah petani kecil terpetakan, dipilih sebagai sampel penelitian (Tabel 2). Setiap petak kebun sawit yang dalam sel terpilih tersebut didatangi. Di Bonai Darussalam, sel sampel terdiri dari total 507 petak dengan pemilik berbeda. Sementara di Rokan Hulu Tengah, sel sampel terdiri dari 1.337 petak dengan pemilik berbeda. Untuk setiap petak yang teridentifikasi, data dikumpulkan menurut usia penanaman sawit, luas petak, etnis pemilik, asal dan lokasi rumah tinggal, serta besaran total sawit yang dimiliki.

Tabel 2. Ringkasan hasil analisis penginderaan jarak jauh.

	Bonai Darussalam		Central Rokan Hulu		Total	
	Area (ha)	% area	Area (ha)	% area	Area (ha)	% area
Budidaya Sawit Petani Mandiri (BSPM)	39.568	28%	43.493	26%	83.062	27%
Budidaya sawit perusahaan	35.684	26%	33.353	20%	69.038	23%
Total sawit	75.252	54%	76.846	46%	152.099	50%
Total lahan	138.938	100%	165.417	100%	304.355	100%
Rata-rata wilayah petani mandiri tiap sel 25 ha	18,0		13,0		15,1	
Wilayah APL	51.400	37%	101.050	61%	152.450	50%
Lahan hutan negara	87.538	63%	64.367	39%	151.905	50%
Area sampel (BSPM)*	2.141 (119)	5,4%	2.190 (168)	5,0%	4.331 (287)	5,2%

* Jumlah sel yang disurvei ditunjukkan dalam kurung.

Setelah identifikasi awal seluruh pemilik petak, survei mendalam dilakukan terhadap 230 pemilik petak yang berlokasi terutama di tengah-tengah setiap sel sampel². Survei mendalam mengungkap berbagai topik, mulai dari aktivitas pencaharian sebelum dan saat ini, sampai pada informasi mengenai sumber masukan (input) dan pasar penjualan TBS, sumber keuangan, dan masalah terkait kepatuhan persyaratan legal ISPO (mis. bukti kepemilikan lahan, penggunaan benih tanaman tersertifikasi dan praktik produksi). Untuk tiap petak yang menjadi subyek survei mendalam, informasi rinci mengenai kondisi petak juga dikumpulkan. Informasi ini meliputi antara lain mengenai defisiensi nutrisi, bibit tanaman, kualitas pemangkas, penyiangan dan pemeliharaan, upaya untuk mengendalikan erosi dan kanalisasi.

Dalam rangka mengidentifikasi sub-kelompok yang menampilkan karakteristik serupa dalam populasi sampel, dilakukan HCA. HCA memaksimalkan variasi antar klaster dan meminimalkan variasi internal klaster. Analisis ini memanfaatkan data yang dikumpulkan dari 1.840 petak, dikelompokkan berdasarkan: (1) *total ukuran pemilikan petak* (dikodifikasi menjadi kelompok kecil (0–3 ha), medium (3,1–15 ha) atau besar (15+ ha)); (2) *asal pemilik petak* (dikodifikasi berasal dari kecamatan atau dari luar kabupaten); (3) *tempat tinggal pemilik petak* (dikodifikasi sebagai tinggal di kecamatan atau di luar kabupaten); (4) *etnisitas*; dan (5) *jenis tanah* (mis. dikodifikasi berlokasi terutama di tanah gambut atau mineral). Indikator-indikator tersebut adalah proksi untuk menjelaskan tentang kesejahteraan, asal dan absentisme (pemilik yang tidak mengolah tanahnya tetapi mengambil hasilnya melalui penggarapnya), serta kondisi geografis yang mereka hadapi, yang dalam penelitian eksploratoris diidentifikasi sebagai variabel sangat penting dalam membedakan sub-kelompok.

² Sebagian pemilik dengan petak yang luas tersebar beberapa sel, namun mereka diwawancara sekali. Tidak seluruh petani dapat diwawancarai; oleh karena itu jumlah wawancara lebih sedikit daripada jumlah sel yang dikunjungi.

5 Hasil

Tabel 3 menyajikan hasil HCA. Total enam kluster teridentifikasi, dan tiap kluster berisi antara 1% hingga 37% petani dan antara 8% dan 30% areal. Nilai yang berbeda dari rata-rata populasi diwarnai kuning. HCA menghasilkan kluster sekitar total ukuran pemilikan petak dengan membagi tiap tiga ukuran kategori menjadi dua sub-kelompok.

Tabel 3. Hasil HCA.

Kluster	1	2	3	4	5	6
1) Jenis pemilik (ukuran)	Petani kecil (0–3 ha)		Petani menengah (3.1–15 ha)		Petani besar (> 15 ha)	
2) Asal: dari kecamatan	0%	92%	8%	87%	2%	28%
2) Asal: dari luar kabupaten	92%	0%	88%	1%	81%	63%
3) Tinggal di kecamatan	92%	91%	74%	89%	2%	79%
3) Tinggal di luar kabupaten	3%	1%	16%	3%	92%	0%
4) Etnis: Melayu	2%	65%	0%	65%	6%	20%
4) Etnis: Batak	17%	17%	31%	34%	49%	46%
4) Etnis: Jawa	78%	15%	66%	0%	9%	32%
4) Etnis: Minang	2%	0%	2%	0%	5%	1%
4) Etnis: Tionghoa	0%	0%	0%	0%	25%	0%
4) Etnis: lain	0%	1%	0%	0%	1%	1%
5) Jenis tanah: gambut	14%	3%	29%	1%	75%	13%
Status lahan: APL	80%	73%	60%	46%	24%	61%
Lokasi di Rokan Hulu Tengah	76%	93%	62%	89%	10%	74%
Lokasi di Bonai Darussalam	24%	7%	38%	11%	90%	26%
Jumlah sampel petani	506	343	507	190	106	136
Proporsi total sampel petani (%)	28%	19%	28%	11%	6%	8%
Proporsi jumlah petani di wilayah penelitian (%)*	37%	29%	24%	8%	1%	1%
Sampel wilayah tanam (ha)	545	364	1112	386	1296	626
Proporsi total sampel areal (%)	13%	8%	26%	9%	30%	14%

* Dihitung sebagai rata-rata ukuran petak tiap jenis petani atas total sampel areal. Hal ini untuk mengoreksi bias sampling yang terjadi akibat jumlah dan proporsi sampel petani. Petani besar, misalnya, berkemungkinan masuk sampel dibanding petani kecil.

Catatan: Besaran kategorisasi tidak bisa didapatkan dari 32 petani dan 20 petani di luar batas statistik, hal ini mengurangi tipologi populasi dari 1.840 petani menjadi 1.788 petani dan luas wilayah dari 4.453 menjadi 4.329 ha.

Tabel 4 menyajikan ringkasan hasil terpilih dari analisis survei sub-sampel 230 pemilik petak. Analisisnya menggunakan pengelompokan kluster untuk lebih jauh mengungkap karakteristik petani kecil. Hasil-hasil mengenai, antara lain, pengelolaan perkebunan, karakteristik sosio ekonomi, artikulasi pasar dan masalah legalitas akan dibahas lebih dirinci dalam publikasi mendatang.

Tabel 4. Petikan hasil survei mendalam sub-sampel.

Klaster	1	2	3	4	5	6	Nilai-F
Rata-rata areal sawit (ha)	2,1	1,8	6,6	6,9	217,8	91,3	18,883***
N	36	34	58	35	37	25	
Std,dev,	0,7	0,6	2,6	3,0	259,4	115,8	
Rata-rata panen (MT/ha/ year)	15,5	15,6	15,7	15,4	12,9	18,6	2,56**
N	36	35	57	34	39	26	
Std,dev,	5,7	5,6	6,6	5,4	6,6	5,0	
Rerata usia tegakan (thn)	8,2	8,4	8,4	6,8	8,7	11,0	2,259**
N	36	35	58	35	39	27	
Std,dev,	4,2	5,4	4,3	3,6	4,4	5,2	
Rerata % of tenera sawit ^a	24%	21%	29%	32%	46%	34%	3,050**
N	29	32	49	31	36	22	
Std,dev,	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	
% aktivitas kebun melibatkan keluarga	69%	86%	39%	45%	1%	20%	

a *Sawit tenera* adalah hibrida dari varietas *dura* dan *pisifera* (DxP) yang memiliki kandungan minyak lebih signifikan dibanding varietas non-hibrida, Catatan: Nilai-F ditulis dengan * pada signifikansi tingkat 0,1, **tingkat 0,05 dan*** tingkat 0,01

6 Tipologi petani kecil

Hasil yang disajikan menunjukkan keberagaman petani kecil mandiri di Riau. Tipologi petani yang kami kembangkan mengidentifikasi beberapa karakteristik khusus tiap kelompok serta perubahan kebijakan dan prioritas tiap kelompok tertentu.

6.1 Tipe 1: Petani kecil migran

6.1.1 Karakteristik sosial

Kelompok ini terutama terdiri dari masyarakat migran relatif miskin dari etnis Jawa dan sebagian kecil etnis Batak. Sebagian besar etnis Jawa dalam kelompok ini bermigrasi ke Riau pada 1980-an lewat program transmigrasi pemerintah. Sebagian lain bermigrasi secara mandiri dari Sumatera Utara untuk mencari lahan lebih murah atau dari Aceh akibat konflik yang terjadi di sana. Migran Batak umumnya bermigrasi dari tanah kelahirannya di Sumatera Utara, seperti sebagian kecil petani Jawa yang mencari lahan lebih murah. Mengingat Sumatera Utara memiliki perekonomian perkebunan paling mapan di Indonesia dan kepadatan penduduk relatif tinggi, pilihan ekspansi menjadi terbatas dibanding di Riau, provinsi tetangganya. Petani dalam kelompok ini cenderung tinggal secara permanen di kecamatan tempat mereka menghasilkan sawit; dan seringkali tinggal dekat dengan perkebunan mereka.

6.1.2 Lokasi perkebunan

Kelompok ini terkonsentrasi di wilayah pertanian lebih mapan di Rokan Hulu Tengah, dimana lokasi lahan yang sebagian besar berada dalam bagian skema transmigrasi, dan sejak lama masuk dalam APL yang memungkinkan budidaya sawit. Kurangnya modal finansial dan politik cenderung menghambat para petani mengeksplorasi wilayah baru. Para petani cenderung enggan meluaskan wilayahnya ke luar Rokan Hulu Tengah, karena dibandingkan dengan Bonai Darussalam, di sini infrastruktur produksi sawit dan layanan sosial serta peluang lapangan kerja lain telah lebih tersedia. Rata-rata ukuran pertanian sebesar 2,1 ha.

6.1.3 Prevalensi

Meski merupakan salah satu kelompok terbesar dalam hal jumlah petani (37%), namun karena ukuran rata-rata lahan pertanian yang kecil mereka hanya menjadi proporsi kecil dalam total wilayah produksi (13%).

6.1.4 Profil ekonomi

Hampir seluruh petani di kelompok ini terlibat dalam pertanian seperti karet dan padi sebelum beralih ke sawit. Kini, mayoritas petani bekerja tambahan sebagai buruh kasar perkebunan sawit dan terlibat dalam aktivitas pertanian lebih komersial, seperti karet. Rata-rata 60% penghasilan kelompok ini didapat dari sawit.

6.1.5 Praktik produksi

Hasil panen kelompok ini setara dengan petani lain, masih jauh di bawah perkebunan skala besar. Secara rata-rata, 69% aktivitas pekerjaan di perkebunan melibatkan anggota keluarga. Kualitas bibit tanaman petani kelompok ini seringkali berada di bawah standar. Varietas *tenera* hanya ditemukan sekitar 24% dari keseluruhan sawit. Para petani ini kemungkinan besar mendapatkan bibit dari sumber tak terdaftar.

6.1.6 Tantangan dan prioritas kebijakan

Dari perspektif pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan, intervensi seharusnya memprioritaskan kelompok ini. Meski proporsi terbesar petani di kelompok ini kurang memiliki hak tenurial formal – sebagian karena proses sertifikasi lahan yang dipersepsi sulit dan mahal – tidak seperti kelompok lain, mereka kemungkinan besar mendapatkan lahan di wilayah yang terencana secara legal. Oleh karena itu, banyak anggota kelompok ini berpotensi mampu mematuhi kriteria ISPO (yang mensyaratkan dokumentasi formal lahan) jika program sertifikasi dijalankan. Lebih jauh lagi, menimbang tingginya perbedaan hasil panen, dukungan rantai-nilai (khususnya yang mendorong peningkatan ketersediaan dan akses pada bibit tersertifikasi serta input produksi) serta peningkatan penyuluh lapangan dapat berkontribusi pada meningkatnya produktivitas dan penghasilan dalam kelompok produsen besar namun rentan ini. Mengingat banyak petani di kelompok ini mengelola dan bekerja di perkebunan mereka sendiri, efektivitas penyuluh lapangan bisa tinggi. Namun, karena dukungan program pemerintah yang secara historis memprioritaskan transmigran, intervensi pada kelompok ini seharusnya tidak merugikan kelompok produsen marjinal lain (mis. petani Tipe 2).

6.2 Tipe 2: Petani kecil asli

6.2.1 Karakteristik sosial

Hampir seluruh petani di kelompok ini berasal dari kecamatan di lokasi mereka mengolah sawit dan beretnis Melayu (kelompok etnis asli Riau). Meski sebagian petani Jawa dan Batak juga ada di sini, berbeda dengan petani Tipe 1, mereka berasal dari wilayah ini. Seringkali, mereka merupakan pemukim generasi kedua (atau lebih), setelah orang tua mereka bermigrasi ke wilayah ini, dan biasanya dengan alasan tidak terkait dengan sawit. Seperti petani Tipe 1, sebagian besar petani di kelompok ini tinggal dekat dengan perkebunan mereka.

6.2.2 Lokasi perkebunan

Meski tidak jauh berbeda dengan petani kecil migran, tipe ini jarang ditemukan di Bonai Darussalam dan di lahan gambut. Hal ini karena kurangnya modal dan, karena mereka juga berasal dari wilayah ini, terdapat ikatan sosial yang kuat terhadap wilayah produksinya. Namun, kelompok ini cenderung kurang memiliki bukti hak formal atas tanah karena persepsi legitimasi klaim historis informal dan tingginya biaya sertifikasi. Seperti petani Tipe 1, mayoritas besar berlokasi di lahan APL. Para petani ini cenderung memiliki lahan di tanah mineral yang lebih subur. Dengan ukuran pertanian per kapita hanya 1,8 ha, kelompok ini paling kecil dalam rata-rata ukuran perkebunan sawitnya.

6.2.3 Prevalensi

Kelompok ini terdiri dari 29% petani kecil, namun hanya menguasai 8% areal.

6.2.4 Profil ekonomi

Mayoritas petani Tipe 2 juga melakukan budidaya tanaman komersial lain, terutama karet. Proporsi besar petani juga bekerja sebagai buruh kasar pertanian, terutama sebagai penyadap karet atau pekerjaan lain di petak sawit. Sekitar 10% menjadi pegawai negeri meski seringkali hanya kerja sampingan pada posisi di tingkat desa. Secara rata-rata, petani mendapatkan 48% penghasilannya dari aktivitas sawit.

6.2.5 Praktik produksi

Hasil panen kelompok ini setara dengan petani lain, masih jauh di bawah perkebunan skala besar. Kelompok ini menunjukkan tingkat partisipasi keluarga tertingggi dalam mengolah kebun (86%).

Bibit tanaman yang digunakan para petani ini seringkali berkualitas di bawah standar dan didapatkan dari agen lokal tanpa sertifikat atau dari buah jatuh. Secara legal, petani tidak dapat membeli benih bersertifikat tanpa dokumentasi lahan. Proporsi sawit varietas *tenera* merupakan yang terendah dibanding seluruh kelompok (12%).

6.2.6 Tantangan dan prioritas kebijakan

Seperti petani Tipe 1, kelompok ini seharusnya menjadi sasaran prioritas dalam program pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan. Kelompok ini paling menghadapi masalah dalam memenuhi prasyarat ISPO karena relatif banyaknya petani yang tidak memiliki hak formal atas tanah. Kondisi ini perlu segera diatasi dengan program sertifikasi tanah. Upaya ini sekaligus juga dapat meningkatkan akses pada bibit bersertifikat.

Lebih dari itu, dengan kondisi populasi yang lebih terintegrasi secara politik dan lebih mapan, di mana keluarga secara erat terlibat dalam pengelolaan perkebunan, efektivitas program penyuluhan akan menjadi lebih tinggi.

6.3 Tipe 3: Petani migran kelas-menengah

6.3.1 Karakteristik sosial

Secara etnis, kelompok ini umumnya berisi etnis Jawa dan Batak. Hampir mirip dengan petani Tipe 1 – setidaknya secara demografis – kelompok ini cenderung berasal dari luar wilayah, mereka seringkali tinggal dekat dengan perkebunan sawit mereka.

6.3.2 Lokasi perkebunan

Karena 38% kelompok ini beraktivitas di Bonai Darussalam, dibanding petani Tipe 1 dan 2, para petani ini secara signifikan kemungkinan besar beroperasi di wilayah bukaan baru yang didominasi oleh lahan gambut. Sebagai kelompok kelas-menengah, kelompok ini cenderung lebih baik dalam permodalan dan berani mengambil risiko. Meskipun tersedia lahan yang lebih luas di daerah bukaan baru, namun karena biaya lebih tinggi dalam penyiapan lahan, tingkat produktivitas lebih rendah, infrastruktur produksi yang kurang terbangun (mis. jaringan jalan dan ketersediaan penyuplai bibit dan pupuk) serta lebih rentan pada gangguan seperti kebakaran lahan cenderung menghambat petani lebih miskin melakukan eksploitasi lahan gambut. Sebanyak 60% petani Tipe 2 ini berlokasi di APL. Rata-rata ukuran lahannya adalah 6,6 ha.

6.3.3 Prevalensi

Mewakili sekitar 24% petani dan menguasai 26% area yang diteliti, dalam hal jumlah dan wilayah yang dikuasai, kelompok ini jelas penting.

6.3.4 Profil ekonomi

Sekitar dua pertiga petani dalam kategori ini juga terlibat dalam pertanian tanaman komersial lain, terutama karet. Dibandingkan dengan petani Tipe 1, lebih sedikit petani Tipe 3 yang terlibat dalam pertanian sebelum mereka menanam sawit. Mereka cenderung mengumpulkan modal dari aktivitas di luar pertanian untuk membangun kebun sawit mereka. Hal ini menunjukkan perbedaan *ex ante* dalam status ekonomi. Sebanyak 20% petani kini terlibat dalam aktivitas buruh kasar perkebunan, 20% sebagai pekerja kantor dan 17 sebagai pegawai negeri. Meskipun kelompok ini relatif memiliki portofolio pencaharian beragam, mayoritas penghasilan masih berasal dari aktivitas sawit.

6.3.5 Praktik produksi

Hasil panen kelompok ini setara dengan petani kecil lain, meski jauh di bawah hasil panen perkebunan skala besar. Secara rata-rata, kurang dari 40% dari total pekerjaan kebun melibatkan keluarga. *Tenera* hanya menunjukkan 29% buah. Ini menunjukkan banyaknya penggunaan bibit yang buruk. Sumber penyedia bibit paling umum berasal dari agen lokal tanpa sertifikat.

6.3.6 Tantangan dan prioritas kebijakan

Kelompok ini dapat menjadi target jika prioritasnya adalah mendukung kewirausahaan kelas menengah dan meningkatkan sektor produktivitas dan keberlanjutan. Relatif tingginya tingkat perkebunan (ilegal) di lahan gambut yang dilakukan kelompok ini menjadi tantangan yang serius dari sisi lingkungan, karena ekspansi sering terkait dengan kebakaran dan deforestasi. Sebelum menjalankan program sertifikasi lahan atau penataan, inventarisasi kepemilikan lahan non-APL, khususnya di Bonai Darussalam, perlu dilakukan untuk menghitung potensi kehilangan (degradasi) kawasan hutan negara dan untuk menyusun kriteria kebun mana saja yang perlu ditata. Terlebih lagi, rendahnya panen dan penggunaan bibit berkualitas rendah menunjukkan bahwa memformalkan pasar input atau faktor produksi dan meningkatkan penyuluhan dapat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas. Karena sebagian besar petani tinggal dekat dengan kebun mereka dan secara langsung mengelola kebunnya setiap hari, program penyuluhan berpotensi memperbaiki praktik produksi yang lebih baik, dibanding pada petani Tipe 1 dan Tipe 2. Namun, banyak juga yang bekerja penuh waktu dalam bidang lain, sehingga mereka lebih bergantung pada pekerja upahan dibanding pekerja rumah tangga.

6.4 Tipe 4: Petani asli menengah

6.4.1 Karakteristik sosial

Petani dalam kategori ini umumnya adalah petani skala-menengah asli Melayu. Hampir seluruhnya berasal dan tinggal dalam kecamatan yang sama dengan perkebunan mereka. Secara demografis, petani-petani ini mirip dengan petani Tipe 2.

6.4.2 Lokasi perkebunan

Petani Tipe 4 jarang ditemui di lahan gambut wilayah terdepan Bonai Darussalam. Meski mayoritas utama petani berlokasi di tanah mineral di Rokan Hulu Tengah, kelompok ini secara signifikan memiliki kebun sendiri di atas kawasan hutan negara dibanding petani Tipe 2. Sebagai kelompok etnis kuat, kelompok ini sebagian terkait dengan kekuatan politik sehingga cenderung mengurangi persepsi mereka terhadap risiko yang terjadi karena beroperasi di areal yang tidak diperuntukkan untuk kebun kelapa sawit dan/atau tanpa hak formal atas tanah. Rata-rata ukuran perkebunan sawit serupa dengan petani Tipe 3 (6,9 ha).

6.4.3 Prevalensi

Kelompok ini relatif kecil, baik dalam ukuran jumlah petani (8%) maupun luas areal (9%).

6.4.4 Profil ekonomi

Seperti pada Tipe 2, sekitar dua-pertiga petani juga terlibat dalam aktivitas pertanian lain. Meskipun hanya 6% bekerja sebagai buruh perkebunan, dengan proporsi relatif besar bekerja sebagai pegawai negeri. Besaran pemasukan dari sawit, rata-rata mencapai hampir 60%.

6.4.5 Praktik produksi

Hasil panen setara dengan petani kecil lain, masih jauh di bawah perkebunan skala besar. Secara rata-rata, keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas pengelolaan perkebunan sebesar 45%. Dengan 49% petani menyatakan bahwa mereka membeli bibit dari agen lokal tanpa sertifikat, hasil rata-rata hanya 32% sawit ditemukan menghasilkan buah *tenera*.

6.4.6 Tantangan dan prioritas kebijakan

Kelompok ini bisa menjadi target jika prioritasnya adalah untuk mendukung kewirausahaan kelas menengah. Kelompok ini relatif kecil dalam jumlah maupun wilayah. Karena mayoritas petani dalam kelompok ini berlokasi di luar APL, kelompok ini akan menghadapi masalah karena tidak memenuhi prasyarat ISPO, jika tidak ada dukungan yang memadai. Namun, sedikit saja petani Tipe 4 yang kebunnya berlokasi di areal bukaan baru yang sensitif lingkungan dan itupun di tanah mineral kawasan hutan yang telah lama dikonversi menjadi sawit. Dengan demikian, mengubah status kawasan menjadi APL akan menghindarkan tersingkirnya kelompok ini tanpa berdampak pada sektor keberlanjutan secara signifikan. Seperti banyak kelompok lain, meregulasi dan memodernisasi pasar input dan memberikan penyuluhan terarah dapat membantu mengurangi celah perbedaan hasil panen. Bantuan penyuluh lapangan berpotensi memberi hasil positif karena mereka adalah kelompok petani mapan yang sangat bergantung pada pertanian dan cenderung mampu memantau aktivitas pekerjaan di kebun-kebun mereka karena tinggalnya dekat.

6.5 Tipe 5: Petani skala besar perintis bukaan lahan baru

6.5.1 Karakteristik sosial

Petani di kelompok ini umumnya berasal dari luar kabupaten dan juga tinggal di luar kabupaten. Pemilik biasanya berasal dan tinggal di kota besar seperti Medan, Pekanbaru dan Jakarta.

Meski sebagian tinggal di kabupaten terdekat, karena memiliki rumah sendiri, mereka sering tinggal di beberapa tempat. Mayoritasnya adalah etnis Batak kaya (49%) atau Sino-Indonesia (25%); dua etnis yang secara eksklusif menjadi bagian terbesar kelompok ini.

6.5.2 Lokasi perkebunan

Mayoritas perkebunan berlokasi di lahan gambut Bonai Darussalam (75%), di mana areal lahan sekitarnya dapat diperoleh dengan relatif murah. Hanya 24% perkebunan (sebagiannya) berlokasi di APL. Kelompok ini kemungkinan besar memiliki berbagai jenis hak atas tanah. Banyak petani bisa, misalnya, bisa memperoleh surat keterangan penguasaan tanah di kawasan hutan dari pemerintah kecamatan. Hal ini bisa terjadi karena adanya mafia tanah yang mengendalikan pasar lahan di wilayah bukaan baru. Dari perspektif legal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat memformalkan jenis klaim lahan ini. Rata-rata ukuran perkebunan sawit yang dimiliki petani ini sebesar 217,8 ha.

6.5.3 Prevalensi

Meski kelompok ini hanya mewakili 1% petani, mereka menguasai hampir sepertiga area lahan petani sawit mandiri. Oleh karena itu, mereka adalah kelompok terkecil dalam hal jumlah petani, tetapi terbesar dalam hal luas wilayah.

6.5.4 Profil ekonomi

Sekitar 20% petani Tipe 5 adalah bekas pegawai negeri dan lebih dari separuhnya wirausaha. Sementara petani keturunan Tionghoa lebih banyak memiliki bisnis (nonpertanian) lain, sebagian besar

petani Batak memiliki spesialisasi dalam perdagangan sawit dan tanah. Mengingat tingginya biaya dan risiko lingkungan untuk membangun kebun sebesar itu, petani kelompok ini jelas merupakan “petani” paling makmur.

6.5.5 Praktik produksi

Petani kelompok ini mendapatkan hasil panen terendah dibanding seluruh kelompok. Hal ini antara lain karena fokus mereka pada tanah gambut, yang kurang cocok untuk budidaya sawit dibanding tanah mineral. Pengelolaan kedalaman air dan praktik produksi mereka juga buruk. Meskipun, bibit lebih sering dibeli dari penyalur resmi atau agen lokal bersertifikat formal dibanding petani jenis lain. Hasilnya, proporsi varietas *tenera* tertinggi di kelompok ini (46%). Kelompok ini hampir sepenuhnya bergantung pada buruh upah untuk mengelola kebunnya dan sangat kecil kemungkinan untuk secara langsung terlibat dalam pengelolaan harian. Kelompok ini juga kemungkinan besar menjual hasil secara langsung pada kilang pengolahan, sementara kelompok lain sangat bergantung pada tengkulak lokal.

6.5.6 Tantangan dan prioritas kebijakan

Kelompok ini perlu diprioritaskan dari perspektif sektor keberlanjutan. Mengingat kelompok ini berlokasi di lahan gambut dalam lahan hutan negara, petani Tipe 5 adalah salah satu penyebab utama ekspansi di wilayah bukaan baru di Rokan Hulu yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Jika aturan legalitas ISPO diterapkan secara ketat, sebagian besar petani di kelompok ini tidak akan bisa memenuhi persyaratan. Selain masalah bukti atas tanah, seluruh petani di kelompok ini seharusnya mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) sebagai persyaratan legal mengelola kebun lebih dari 25 ha. Secara teknis, kelompok ini tidak lagi dapat dikelompokkan sebagai ‘petani kecil’ dan, oleh karena itu, perlu mematuhi kriteria ISPO yang lebih ketat layaknya perusahaan. Menimbang luasnya areal lahan dan ketidakpatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah perlu melakukan investigasi dan mengatasi praktik gelap perdagangan lahan di wilayah bukaan baru seperti Bonai Darussalam dan menyusun kriteria untuk menata kebun-kebun tersebut. Masalah produktivitas juga muncul di kelompok ini, karena kebun-kebun menjadi investasi bisnis yang seringkali tidak secara langsung dipantau oleh pemiliknya. Memberi bantuan penyuluhan pada kelompok ini kemungkinan tidak memberi hasil signifikan, karena jelas pemiliknya memiliki akses modal yang cukup untuk investasi penambahan pengetahuan dalam meningkatkan produktivitas. Lebih dari itu, hanya sedikit justifikasi politis untuk mengerahkan sumber daya publik pada para pengguna lahan yang telah mengeruk manfaat dari eksploitasi sumber daya lahan publik. Namun, pemantauan ketat dan penegakan standar keberlanjutan untuk meningkatkan praktik seraya memberi akses informasi lebih baik dapat meningkatkan performa kelompok ini dalam hal keberlanjutan. Salah satu keuntungan jika menargetkan kelompok ini adalah produktivitas kebun pada areal yang luas dapat ditingkatkan hanya dengan fokus pada sebagian kecil petani saja.

6.6 Tipe 6: Produsen besar terkonsolidasi

6.6.1 Karakteristik sosial

Petani Tipe 6 adalah petani besar yang, berbeda dengan petani besar perintis garis depan Tipe 5, sebagian besar petani tipe ini tinggal di kecamatan yang sama dengan perkebunannya meskipun berasal dari luar kabupaten. Meskipun petani Batak mendominasi dengan mengisi separuh dari kelompok ini, kelompok ini relatif lebih beragam dan mencakup etnis Jawa dan Melayu.

6.6.2 Lokasi perkebunan

Kelompok ini umumnya aktif di tanah mineral Rokan Hulu Tengah dan 61% perkebunan (sebagiannya) berlokasi di APL; relatif lebih banyak dari petani Tipe 4 dan 5. Dengan rata-rata tegakan

11 tahun, kelompok wirausaha ini tampaknya menjadi perintis perkebunan kecil mandiri di Rokan Hulu, memiliki rata-rata 91,3 ha.

6.6.3 Prevalensi

Kelompok ini terdiri dari sekitar 1% petani sawit mandiri dan 14% areal.

6.6.4 Profil ekonomi

Banyak petani Tipe 6 terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, sebanyak 47% terlibat dalam aktivitas pertanian lain, 41% memiliki bisnis nonpertanian, dan 6% pegawai negeri. Namun, secara rata-rata 74% penghasilan didapat dari sawit, yang sekaligus menunjukkan bahwa kelompok ini relatif telah memiliki spesialisasi.

6.6.5 Praktik produksi

Hasil panen kelompok ini tertinggi dari enam kelompok yang ada, meski sebagian kebun sawitnya berumur lebih tua. Meskipun diklaim bahwa bibit tanaman umumnya bersumber dari penyalur resmi atau agen lokal bersertifikat, namun hanya 34% sawit ditemukan memproduksi buah *tenera*. Kelompok ini sangat bergantung pada buruh upah, hanya hampir 20% melibatkan keluarga dalam aktivitas pekerjaan di kebun. Sebagian besar pemilik tinggal dekat dengan kebun, petani di kelompok ini, tidak seperti petani Tipe 5, bisa dipandang lebih terlibat secara langsung dalam pengelolaan harian.

6.6.6 Tantangan dan prioritas kebijakan

Kelompok ini bukan prioritas mendesak dari perspektif produktivitas atau keberlanjutan. Namun, karena sejumlah besar petani berlokasi di lahan hutan negara dan seharusnya memiliki IUP karena ukuran lahan mereka yang luas, aspek legalitas menjadi hambatan prasyarat pemenuhan standar ISPO yang perlu ditangani agar mereka tidak tersingkir. Karena sebagian berlokasi di daerah bukaan baru yang sensitif dari aspek lingkungan, mengubah status banyak areal menjadi APL akan secara formal membantu mengintegrasikan kelompok ini ke dalam rantai pasar resmi tanpa mengganggu sektor keberlanjutan secara signifikan. Kelompok ini juga memiliki potensi untuk menjadi kelas petani komersial terlegitimasi jika diberi dukungan legal dan bantuan teknis untuk memungkinkan kepatuhan terhadap kriteria ISPO yang lebih ketat untuk perusahaan swasta. Kelompok ini penting secara kewirausahaan, sosial dan politik dalam masyarakat dimana sawit lebih dari sekadar investasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan dukungan bagi petani kecil dan menengah lain di Rokan Hulu Tengah dalam memperbaiki praktik produksinya. Misalnya, seperti apa yang telah dilakukan dengan baik di sektor lain, mereka dapat memainkan peran langsung dalam memobilisasi dukungan eksternal, penyediaan input lokal dan dukungan teknis. Seperti petani Tipe 5, praktik produksi di sepanjang areal yang relatif besar dapat ditingkatkan dengan hanya mengelola sejumlah kecil petani.

7 Kesimpulan dan saran

Meski banyak petani kecil sawit mandiri Riau yang sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dikenal sebagai 'petani', sebagian besar areal yang berada dalam pengelolaan petani sawit mandiri tidak semua masuk dalam batasan tersebut. Kelompok petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 3 ha dan sangat bergantung pada tenaga kerja keluarga, seperti yang dikenal dengan definisi petani kecil, mencakup 66% dari jumlah penduduk, namun mereka hanya memiliki seperlima area yang dikelola petani. Data ini menunjukkan bahwa kelompok produsen yang paling dominan, khususnya di bentang alam terdepan, tidak tepat digolongkan sebagai petani. Mereka beroperasi layaknya bisnis dan dicirikan dengan absentisme. Perbedaan besar di antara kelompok-kelompok yang menempati dua ujung spektrum petani ini menunjukkan bahwa menerapkan intervensi satu-untuk-semua kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuan kebijakan secara efektif. Lebih dari itu, hasil menunjukkan bahwa kelompok berbeda seharusnya ditempatkan dalam prioritas kebijakan berbeda.

Tipologi yang kami kembangkan menunjukkan bahwa tipe intervensi yang berbeda diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Beberapa intervensi dilakukan untuk menjawab masalah produktivitas, legalitas dan keberlanjutan struktural, sementara intervensi lain lebih spesifik pada kebutuhan kelompok. Sebagai kesimpulan, kami merekomendasikan hal-hal berikut:

1. **Introduksi program sertifikasi lahan**, khususnya untuk petani kecil dan menengah (Tipe 1 sampai 4). Petani dengan luas kebun yang lebih kecil, khususnya, cenderung menduduki lahan APL. Karena persepsi legitimasi klaim informal, tingginya biaya dan kesulitan mendapatkan sertifikat lahan, mereka enggan memformalkan hak kepemilikan. Jika hal ini tidak diatasi dengan baik, yang terjadi tidak hanya kelompok produsen termarginalkan tersebut tersingkirkan dari pasar formal akibat ketidakpatuhan pada standar ISPO, tetapi intervensi untuk peningkatan akses pasar *input* (khususnya benih) menjadi tidak efektif. Petani dengan kepemilikan kebun lebih dari 25 ha seharusnya didorong untuk memiliki izin (mis. IUP).
2. **Menata kepemilikan lahan di kawasan hutan** dengan mengubah status lahan menjadi APL perlu dipertimbangkan secara serius. Di areal-areal pertanian yang mapan dimana deforestasi telah berlangsung lama (seperti di Rokan Hulu Tengah), penataan kepemilikan lahan akan mencegah tersingkirnya kelas wirausaha warga asli dengan kebun ukuran menengah sampai besar, yang berperan penting menjaga produktivitas buah sawit (mis. Tipe 4 dan 6), hanya akibat tidak memenuhi salah satu syarat ISPO, tanpa secara signifikan mengorbankan aspek keberlanjutan. Di areal-areal yang memiliki nilai penting bagi lingkungan, seperti Bonai Darussalam, yang didominasi petani sangat besar (mis. Tipe 5), jelas diperlukan investigasi menyeluruh terhadap praktik perdagangan gelap dan penyimpangan formalisasi lahan untuk mencegah ekspansi lebih lanjut. Kriteria kelayakan perlu disusun untuk menentukan bagaimana lahan non-APL diatur tanpa lebih jauh lagi memperburuk dampak negatif lingkungan.
3. **Program peningkatan rantai-nilai pada pasar bahan baku** diperlukan untuk meningkatkan produktivitas di seluruh kelompok produsen. Meski produsen lebih kecil kemungkinan kecil mendapatkan bibit tanaman dari penyuplai resmi (karena kurangnya dokumentasi lahan), perkebunan lebih besar juga sering menggunakan bibit yang bukan jenis hibrida berkualitas tinggi sehingga sering mengalami serbuan *dura*. Hal ini menunjukkan bahwa meluasnya praktik penjualan bibit palsu berdampak pada seluruh tipe petani. Meski tidak secara eksplisit dipaparkan dalam penelitian ini, masalah serupa juga terpantau pada pasar pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan (penegakan hukum) standar kualitas bahan baku, disertai dengan perbaikan akses dan ketersediaan, dan adanya manfaat penggunaan bibit berkualitas dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas sub-sektor ini.

4. **Investasi peningkatan penyuluh lapangan** berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan formalitas petani. Penyuluh lapangan seharusnya menargetkan kelompok kecil dan menengah (mis. Tipe 1 hingga 4), khususnya di wilayah pertanian mapan seperti Rokan Hulu Tengah. Mendorong peningkatan praktik produksi di kelompok-kelompok ini akan berkontribusi dalam menurunkan celah hasil panen, meningkatkan penghasilan petani dan memfasilitasi kepatuhan ISPO. Karena petani lebih kecil, khususnya, sangat bergantung pada tenaga kerja keluarga dan secara erat terlibat dalam tata kelola harian perkebunan, adopsi praktik pengelolaan yang lebih baik kemungkinan akan relatif tinggi. Petani besar yang mampu memformalkan klaim lahan mereka dan mendapatkan IUP dalam konteks program tersebut akan lebih diuntungkan dengan adanya program pemerintah dan bantuan teknis dalam mematuhi standar ISPO yang lebih ketat untuk perusahaan swasta. Mengingat banyak petani asli besar menjadi bagian tak terpisahkan dalam ekonomi sawit lokal dan memegang pengaruh sosial dan politik, mereka berpotensi memainkan peran penting mewakili kepentingan petani kecil dan membantu meningkatkan produktivitas dan legalitas. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan untuk menghindari tersingkirnya kelompok penting ini karena tidak memenuhi syarat ISPO.

Pendekatan menyeluruh menangani masalah produktivitas, legalitas, dan keberlanjutan diperlukan untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas intervensi. Misalnya, intervensi yang berhasil meningkatkan hasil panen dan penghasilan petani dapat mendorong ekspansi kebun di areal-areal yang baru. Oleh karena itu, intervensi perlu disertai tindakan lebih tegas dalam menegakkan regulasi terkait dan persyaratan ISPO. Selain itu, peningkatan penyuluh lapangan tanpa meningkatkan akses petani kecil pada bahan baku berkualitas lebih tinggi akan menurunkan kapasitas petani mewujudkan potensi produktivitasnya. Di satu sisi, ini menunjukkan perlunya menyelesaikan masalah struktur kelembagaan yang membatasi kapasitas dan kemauan instansi pemerintah terkait untuk menegakkan aturan dan secara efektif menjalankan program prioritas. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan perlunya perencanaan lebih terintegrasi dan kerjasama lintas-organisasi, yang seharusnya juga melibatkan sektor swasta.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu 2015. Kabupaten Rokan Hulu dalam angka 2015: 256.
- Badrun M. 2011. *Milestone of Change: Developing a Nation Through Oil Palm "PIR"*. Jakarta, Direktur Jenderal Perkebunan.
- BAPPEDA Rokan Hulu (tanpa tanggal). Batas Administrasi_Rokan_Hulu. Pasir Pengaraian, BAPPEDA.
- [CIFOR] Center for International Forestry Research. 2014. *Pre-fire deforestation in Riau from 1990 to 2013*. Bogor, Indonesia: CIFOR. <http://gislab.cifor.cgiar.org/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b7CCA4303-DC88-4A68-878F-BC38B28F3BE8%7d>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2014-2016. Jakarta, Direktur Jenderal Perkebunan: 69.
- Donough CR, Wittand C, Fairhurst TH. 2010. Yield intensification in oilpalm using BMP as a management tool. Penang, Malaysia, International Plant Nutrition Institute (IPNI) Southeast Asia Program: 8.
- Kementerian Pertanian. 2011. Peta sebaran lahan gambut di Sumatera. *Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Lahan Pertanian*. Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Molenaar JW, Persch-Orth M, Lord S, Taylor C dan Harms J. 2013. *Diagnostic Study on Indonesian Palm Oil Smallholders: Developing a better understanding of their performance and potential*, International Finance Corporation: 96.
- Zen Z, Barlow C, Gondowarsito R dan McCarthy JF. 2016. Interventions to Promote Smallholder Oil Palm and Socio-economic Improvement in Indonesia. *The Oil Palm Complex: Smallholders, agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia*. R. Cramb dan J. F. McCarthy. Singapura, National University of Singapore:78-108.

DOI: 10.17528/cifor/006334

Working Paper CIFOR berisi hasil penelitian tahap awal atau lanjut, yang merupakan isu penting terkait hutan tropis, dan perlu dipublikasikan pada waktu yang tepat. *Working Paper* tersebut dibuat untuk menginformasikan sekaligus mendorong dilakukannya pembahasan. Isinya telah ditinjau secara internal, tetapi belum melewati proses tinjauan sesama rekan dari luar yang memakan waktu lebih lama.

Cepatnya ekspansi petani mandiri di sektor sawit Indonesia menghadirkan tantangan penting dalam hal produktivitas, keberlanjutan dan legalitas. Sebagai dampaknya, semakin disadari pentingnya pengaturan yang lebih baik petani sawit mandiri dalam pembuatan kebijakan. Mengingat sub-sektor ini terdiri dari beragam kelompok pemangku kepentingan dengan tantangan berbeda, pendekatan terarah dan berbeda sesuai dengan kelompok pemangku kepentingan dibutuhkan dalam regulasi sektor ini. Upaya mewujudkan hal tersebut, sejauh ini, kurang berhasil akibat kurangnya pemahaman mengenai karakteristik petani sawit mandiri dan tantangan yang dihadapinya. *Working Paper* ini bertujuan untuk dapat berkontribusi mengisi celah pengetahuan tersebut dengan mengembangkan tipologi petani sawit mandiri. Menggunakan analisis klaster hirarkis pada data lapangan yang dikumpulkan dari 1.840 petani di salah satu kabupaten penghasil sawit terbesar di Sumatera, Rokan Hulu, enam sub-kelompok diidentifikasi. Pengelompokan ini dilakukan dengan membedakan berdasar karakteristik sosial, ekonomi dan geografisnya. Dari hasil tersebut, laporan ini juga mengidentifikasi sejumlah prioritas intervensi spesifik bagi tiap sub-kelompok.



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetik pohon yang mencakup lanskap dari hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin FTA melalui kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, International Center for Tropical Agriculture dan World Agroforestry Centre.



Fund



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

cifor.org | blog.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

